

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH INVESTASI, PERTUMBUHAN PENDUDUK, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI PULAU SULAWESI

RIFAT AL MUGHNI

A011191157



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH INVESTASI, PERTUMBUHAN PENDUDUK, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI PULAU SULAWESI

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi

Disusun dan Diajukan oleh

RIFAT AL MUGHNI
A011191157



Kepada

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH INVESTASI, PERTUMBUHAN PENDUDUK, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI PULAU SULAWESI

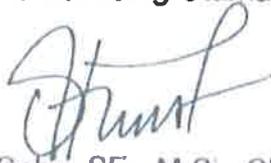
Disusun dan diajukan oleh

RIFAT AL MUGHNI
A011191157

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 8 Oktober 2024

Pembimbing Utama



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP. 19740715 2000212 1 003

Pembimbing Pendamping



Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM®
NIP 19770913 200212 2002

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP 19740715 20002121 003

SKRIPSI

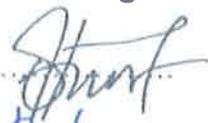
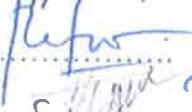
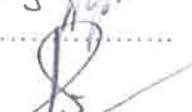
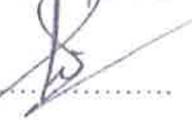
ANALISIS PENGARUH INVESTASI, PERTUMBUHAN PENDUDUK, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI PULAU SULAWESI

disusun dan diajukan oleh:

RIFAT AL MUGHNI
A011191157

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **8 Oktober 2024**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®	Ketua	1. 
2.	Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM®	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., CPF.	Anggota	3. 
4.	Drs. A. Baso Siswadharna, M.Si.	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin




Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP 19740715 2000212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Rifat Al Mughni
Nomor Pokok : A011191157
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UNHAS
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **Analisis Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Penduduk, dan Belanja Modal terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Pulau Sulawesi** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari hasil Skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 24 September 2023

Yang menyatakan



(Rifat Al Mughni)
Nim. A011191157

PRAKATA

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu wata'ala atas segala karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Penduduk, dan Belanja Modal terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Pulau Sulawesi" dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam menyelesaikan studi serta untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyaknya kekurangan sehingga peneliti dengan terbuka akan menerima kritik dan saran yang membangun untuk dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Peneliti juga menyadari bahwa selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari adanya dukungan doa dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka, diantaranya :

1. Ibu Indo Upe *rahimahallah* yang telah membesarkan, mendidik, memberikan kasih sayang, doa, dukungan, dan restu kepada penulis, semoga Ibu diberikan keselamatan di Alam Barzakh sana dan keselamatan di Akhirat kelak. Kepada Bapak Jurmin yang telah membesarkan, mendidik, memberikan doa, dan restu kepada penulis, serta dukungan materiil sehingga penulis tidak pernah merasakan kekurangan akan materi, semoga bapak selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan kasih sayang kepada ibu dan bapak serta mengangkat derajat beliau berdua, aamiin.
2. Bapak Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Sabir, S.E., M.Si., CWM[®]. Selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi sekaligus penasihat akademik dan dosen pembimbing I peneliti. Terima kasih atas segala bantuan, arahan, bimbingan, saran, motivasi, serta waktu yang telah diberikan hingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi. Ibu Dr. Fitriwati Djam'an, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Departemen

Ilmu Ekonomi, terima kasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan. Semoga bapak dan ibu serta seluruh keluarga diberikan kesehatan dan kesuksesan.

5. Ibu Dr. Retno Fitrianti, S.E., M.Si., CWM[®]. selaku dosen pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas arahan, bimbingan, saran, serta waktu yang telah diberikan kepada peneliti selama proses bimbingan berlangsung. Mohon maaf apabila peneliti memiliki banyak kesalahan sampai menyinggung Ibu selama proses bimbingan berlangsung. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan serta segala kebaikan Ibu dibalas oleh Allah Azza Wa Jalla.
6. Ibu Dr. Sri Undai Undai Nurbayani, SE., M.Si., CPF. dan Bapak Drs. A. Baso Siswadharna, M.Si. selaku dosen penguji. Terima kasih telah meluangkan waktu, kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini, semoga Allah Azza Wa Jalla membalas kebaikan ibu dan bapak.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan pengetahuan dan menginspirasi, terima kasih atas segala pembelajaran.
8. Segenap Pegawai Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh keluarga peneliti, Rian, Tante Ennu dan seluruh keluarga yang tidak dapat peneliti sebut satu persatu, terima kasih atas doa dan dukungannya. Semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian semua.
10. Teman-teman GRIFFINS IE 19 yang tidak dapat saya sebut satu persatu, terima kasih atas pertemanannya dan bantuannya selama menjadi mahasiswa Universitas Hasanuddin.
11. Teman-teman MATRIKS SMAELI yang sampai saat ini masih selalu menemani peneliti, terima kasih untuk pertemanan yang sangat berarti ini.
12. Kepada orang yang telah memberikan banyak pelajaran kepada penulis, terima kasih.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi seluruh pembacanya.

Makassar, 10 Oktober 2024

Rifat Al Mughni

ABSTRAK

ANALISIS PENGARUH INVESTASI, PERTUMBUHAN PENDUDUK, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI PULAU SULAWESI

Rifat Al Mughni¹, Sabir², Retno Fitrianti³

Rifat Al Mughni
Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM[®]
Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM[®]

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi, pertumbuhan penduduk, dan belanja modal terhadap kualitas sumber daya manusia di Pulau Sulawesi tahun 2015-2023. Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan data *time series* dan *cross section* dengan model analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Melalui Uji Chow dan Uji Hausman, didapatkan hasil bahwa model yang terbaik dalam penelitian ini menggunakan Fixed Effect Model (FEM). Dari hasil regresi data panel menggunakan Fixed Effect Model didapatkan hasil bahwa investasi (X1) dan pertumbuhan penduduk (X2) berpengaruh signifikan terhadap kualitas sumber daya manusia, sementara belanja modal (X3) tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Kata Kunci : Investasi, Pertumbuhan Penduduk, Belanja Modal, dan Kualitas Sumber Daya Manusia

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of investment, population growth, and capital expenditure on the quality of human resources on Sulawesi Island in 2015-2023. This study uses panel data which is a combination of time series and cross section data with the analysis model used is panel data regression. Through the Chow Test and the Hausman Test, the results were obtained that the best model in this study used the Fixed Effect Model (FEM). From the results of the regression of panel data using the Fixed Effect Model, it was found that investment (X1) and population growth (X2) had a significant effect on the quality of human resources, while capital expenditure (X3) did not have a significant influence.

Keywords: Capital Expenditure, Human Resource Quality Investment, and Population Growth

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Kualitas Sumber Daya Manusia.....	11
2.1.2 Investasi	13
2.1.3 Pertumbuhan Penduduk	14
2.1.4 Belanja Modal.....	16
2.2 Hubungan antar Variabel	17
2.2.1 Hubungan Investasi dengan Kualitas Sumber Daya Manusia.....	17
2.2.2 Hubungan Pertumbuhan Penduduk dengan Kualitas Sumber Daya Manusia	19
2.2.3 Hubungan Belanja Modal dengan Kualitas Sumber Daya Manusia	20
2.3 Tinjauan Empiris	22
2.4 Kerangka Pikir.....	24
2.5 Hipotesis	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	26
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	26

3.3 Metode Pengumpulan Data.....	26
3.4 Metode Analisis Data	26
3.4.1 Uji Statistik t	30
3.4.2 Uji Statistik F	31
3.4.3 Koefisien Determinasi (R^2)	31
3.4.4 Uji Asumsi Klasik.....	31
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	35
4.1.1 Keadaan Geografis Pulau Sulawesi	35
4.2 Perkembangan Variabel Penelitian	35
4.2.1 Perkembangan Data Kualitas Sumber Daya Manusia (IPM) Provinsi di Pulau Sulawesi 2015-2023.....	36
4.2.2 Perkembangan Data Investasi Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) Provinsi di Pulau Sulawesi 2015-2023	37
4.2.3 Perkembangan Data Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi di Pulau Sulawesi 2015-2023.....	38
4.2.4 Perkembangan Data Belanja Modal Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi 2015-2023.....	40
4.3 Hasil Penelitian	41
4.3.1 Uji Pemilihan Model Regresi Data Panel	41
4.3.2 Uji Asumsi Klasik.....	43
4.4 Hasil Estimasi Regresi Data Panel.....	44
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	50
4.5.1 Pengaruh Investasi Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia	50
4.5.2 Pengaruh Pertumbuhan Penduduk Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia	51
4.5.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia..	52
BAB V PENUTUP	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2015 - 2023	4
Tabel 1.2 Realisasi Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) Seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2015 – 2023	5
Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2015 – 2022.....	7
Tabel 1.4 Belanja Modal Pemerintah Seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2015 – 2022.....	8
Tabel 4.1 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2015 - 2023	36
Tabel 4.2 Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2015 – 2023	37
Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2015 – 2023.....	39
Tabel 4.4 Belanja Modal Pemerintah Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2015 – 2023.....	40
Tabel 4.5 Hasil Uji Chow.....	42
Tabel 4.6 Hasil Uji Hausman.....	42
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	43
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas	44
Tabel 4.9 Hasil Estimasi	45
Tabel 4.10 Individual Effect.....	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Pulau Sulawesi, Empat Pulau Besar Lainnya dan Nasional (Indonesia) Tahun 2015 - 2023.....	3
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data yang digunakan	59
Lampiran 2: Pemilihan Model.....	63
Lampiran 3: Uji Asumsi Klasik.....	64
Lampiran 4: Hasil estimasi Regresi Data Panel	65
Lampiran 5: Biodata.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang berkelanjutan dari suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan agar tercipta kualitas hidup yang lebih baik, di mana dalam melaksanakan pembangunan memiliki tujuan untuk meningkatkan standar hidup setiap orang serta meningkatkan ketersediaan dan pemerataan distribusi kebutuhan pokok, baik dari segi pendapatannya, tingkat konsumsi dan pendidikan serta perluasan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat (Todaro & Smith, 2015). Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan meningkatkan atau menciptakan keadilan dengan mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah, menciptakan ketersediaan lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan (Jayanthi & Arka, 2019). Pembangunan nantinya dapat memperluas kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi serta menciptakan kesejahteraan masyarakat (Awandari & Indrajaya, 2016).

Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya membutuhkan modal manusia yang berkualitas sebagai modal dasar pembangunan (Simarmata & Iskandar, 2022). Artinya, untuk menggerakkan perekonomian nasional tidak cukup hanya bermodalkan pembangunan fisik, tetapi juga daya saing sumber daya manusia menjadi hal yang harus hadir demi peningkatan kualitas pembangunan ekonomi. Manusia merupakan modal utama pembangunan untuk menuju pembangunan inklusif dan merata di seluruh wilayah, dimana pembangunan inklusif diartikan sebagai proses yang mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial dan kesehatan (Wirata, 2022). Untuk menghasilkan manusia yang berkualitas juga diperlukan upaya-upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Adapun kualitas sumber daya manusia dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun melalui

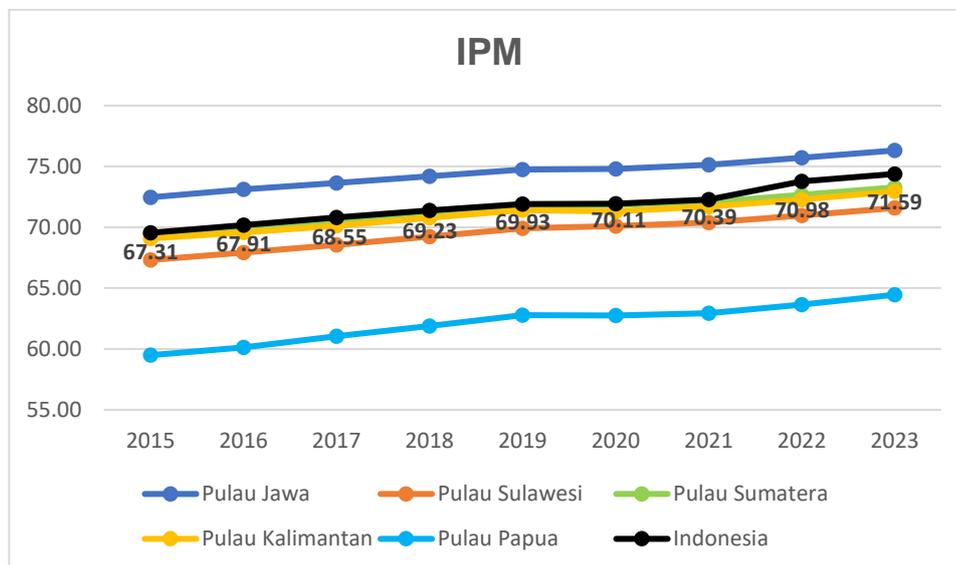
komponen dasar kualitas hidup yang terdiri dari tiga dimensi dasar yaitu: umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); pengetahuan (*knowledge*); dan standar hidup layak (*decent standard of living*) (Badan Pusat Statistik, 2015).

United Nations Development Programme (UNDP) pertama kali memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia pada tahun 1990. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan pembangunan, UNDP secara resmi merevisi metode penghitungan IPM. Penghitungan IPM dengan metode baru tersebut dilakukan pada tahun 2010. Indikator dimensi pengetahuan yang sebelumnya terdiri dari angka melek huruf dan gabungan angka partisipasi kasar diganti menjadi indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Indikator dimensi standar hidup layak yang sebelumnya PDB per kapita kini diganti menjadi PNB per kapita. Selain itu, metode penghitungan rata-rata indeks juga dirubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Pembangunan manusia memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup layak dan sejahtera. Perluasan pilihan manusia dalam meningkatkan kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan, pendapatan, dan pelayanan kesehatan sebagai suatu proses peningkatan kualitas hidup manusia. Kualitas sumber daya manusia yang ada pada suatu daerah dapat dilihat melalui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di mana Nilai IPM berkisar antara 0 hingga 100. Nilai IPM semakin mendekati 100 menunjukkan semakin bagus pembangunan manusia di wilayah tersebut (Arafat dkk., 2018).

BAPPENAS (2019) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menyatakan bahwa kebijakan pembangunan Wilayah Sulawesi tahun 2020-2024 mengarah pada perkuatan peran Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu utama gerbang Kawasan Timur Indonesia. Pulau Sulawesi diharapkan menjadi penopang pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia. RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, yang mana salah satu fokus utama untuk mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 yakni pencapaian kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Sebagai salah satu dari lima Pulau terbesar di Indonesia, Pulau Sulawesi masih tertinggal dari tiga pulau besar lainnya jika dilihat dari angka IPM. Pulau Sulawesi berdasarkan

angka Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2015-2023 menempati urutan terendah ke-dua setelah Pulau Papua. Berikut merupakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 5 Pulau terbesar di Indonesia pada tahun 2015-2023.



Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Pulau Sulawesi, Empat Pulau Besar Lainnya dan Nasional (Indonesia) Tahun 2015 - 2023

Gambar 1.1 di atas menjelaskan dalam sembilan tahun terakhir perbandingan perkembangan IPM Pulau Sulawesi dengan empat pulau besar lainnya di Indonesia dan perbandingan IPM rata-rata nasional Indonesia yang tiap tahunnya mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Terlihat dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir, IPM Pulau Sulawesi masih tertinggal jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Bahkan, Pulau Sulawesi menempati posisi nilai IPM terendah ke-dua di Indonesia setelah Pulau Papua. Nilai IPM tersebut menunjukkan bahwa Pulau Sulawesi masih berada pada kategori sedang dalam indeks pembangunan manusia (*medium human development*). Adapun nilai IPM tertinggi ditempati oleh Pulau Jawa dengan rata-rata IPM yaitu 74,46, yang menjadikan Pulau Jawa telah berada pada status IPM tinggi ($70 \leq \text{IPM} \leq 80$). Selanjutnya diikuti oleh Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan dengan IPM masing-masing sebesar 71,43 dan 71,02. Nilai IPM yang semakin mendekati 100 menunjukkan semakin bagus pembangunan manusia di wilayah tersebut (Arafat dkk., 2018).

Tabel 1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2015 - 2023

PROVINSI	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Sulawesi Utara	70.39	71.05	71.66	72.2	72.99	72.93	73.3	73.81	74.36	72.52
Sulawesi Tengah	66.76	67.47	68.11	68.88	69.5	69.55	69.79	70.28	70.95	69.03
Sulawesi Selatan	69.15	69.76	70.34	70.9	71.66	71.93	72.24	72.82	73.46	71.36
Sulawesi Tenggara	68.75	69.31	69.86	70.61	71.2	71.45	71.66	72.23	72.79	70.87
Gorontalo	65.86	66.29	67.01	67.71	68.49	68.68	69	69.81	70.45	68.14
Sulawesi Barat	62.96	63.6	64.3	65.1	65.73	66.11	66.36	66.92	67.55	65.40

Sumber : BPS, 2023 (diolah)

Tabel 1.1 di atas menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi di Pulau Sulawesi dalam kurun waktu sembilan tahun mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kualitas sumber daya manusia dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Manusia dengan presentase yang baik menunjukkan bahwa dalam daerah tersebut tingkat kualitas sumber daya manusianya cukup baik. Akan tetapi, jika melihat rata-rata regional dalam sembilan tahun terakhir, IPM Pulau Sulawesi masih dalam kategori IPM sedang yaitu IPM antara 60,0-70,0. Dari tabel tersebut diketahui bahwa Provinsi Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah masih memiliki rata-rata IPM di bawah rata-rata IPM Pulau Sulawesi. Sedangkan tiga provinsi lainnya memiliki rata-rata IPM di atas rata-rata IPM di Pulau Sulawesi.

Kesenjangan pembangunan manusia yang dirasakan oleh setiap daerah di Indonesia terkhususnya Pulau Sulawesi bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya investasi. Menurut Nisa & Handayani (2021), hal ini juga dipengaruhi oleh investasi terkhususnya penanaman modal dalam negeri. Kegiatan investasi akan menghasilkan pertambahan bersih terhadap modal atau tambahan stok modal (*capital stock*). Dalam teori investasi Horrow-Domar (Todaro & Smith, 2015) menyatakan investasi sebagai komponen penting yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi, investasi ini diperoleh dari akumulasi tabungan

(*saving*). Kegiatan penanaman modal diharapkan menambah kemampuan produksi barang serta jasa yang tersedia dalam perekonomian yang akan berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan ekonomi.

Tabel 1.2 Realisasi Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) Seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2015 – 2022

Tahun	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tengah	Sulawesi Utara	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Barat	Gorontalo
2015	96,963	35,082	26,067	29,956	7,182	7,317
2016	103,857	39,965	27,710	32,248	7,984	7,721
2017	112,387	41,367	29,718	34,826	8,617	7,956
2018	118,819	42,084	30,806	36,804	9,081	8,285
2019	125,557	50,649	32,653	38,755	9,630	8,560
2020	127,770	46,703	30,777	37,940	8,810	8,474
2021	134,166	69,263	33,257	40,239	9,465	8,714
2022	138,604	85,345	34,235	40,498	9,454	8,874

Sumber : BPS Sulsel, diolah

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa terjadi peningkatan nilai investasi atau Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) terjadi di seluruh provinsi Pulau Sulawesi. Terkhusus pada Provinsi Sulawesi Tengah terjadi kecenderungan peningkatan nilai komponen PMTB dari tahun 2018-2022, walaupun pada tahun 2020-2022 besarnya berfluktuatif. Peningkatan secara nominal maupun riil juga terlihat pada komponen PMTB Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia diperlukan adanya investasi sebagai sumber pembangunan ekonomi, pertumbuhan pendapatan, dan ketenagakerjaan. Investasi yang terjadi di Pulau Sulawesi mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2022. Terlihat pada Tabel 1.2 Investasi terendah berada di Gorontalo dengan akumulasi PMTB di tahun 2022 sebanyak 8.874 miliar rupiah, sedangkan Provinsi yang mengalami investasi tertinggi berada di Sulawesi Selatan dengan akumulasi PMTB di tahun 2022 sebanyak 138.604 miliar rupiah. Tidak meratanya penanaman investasi pada setiap wilayah menyebabkan perbedaan pertumbuhan pendapatan masing-masing sektor perekonomian berbeda.

Jumlah PMTB di Pulau Sulawesi pada tahun 2015 yakni sebesar 202.567 miliar rupiah hingga tahun 2022 menjadi sebesar 317.010 miliar rupiah sehingga jumlah PMTB dari tahun 2015 – 2022 cenderung naik, tetapi nilai distribusi PMTB tiap tahunnya cenderung berfluktuatif, padahal pembentukan modal merupakan faktor penting dalam pembangunan. Pembangunan ekonomi memerlukan dukungan investasi yang merupakan salah satu sumber utama pertumbuhan ekonomi, tetapi distribusi PMTB tiap tahunnya berfluktuatif sehingga berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia (Yanti dkk., 2020).

Selain investasi, faktor lain yang dapat berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan kependudukan. Teori pertumbuhan klasik yang dikemukakan oleh Adam Smith menjadikan unsur pertumbuhan penduduk sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang besar merupakan gambaran tersedianya pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan barang dan jasa yang nantinya akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi dan jaminan tersedianya penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga dapat merangsang peningkatan kesejahteraan masyarakat (Astuti & Astika, 2016). Pertumbuhan penduduk dalam hal ini dapat dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk, angka kelahiran yang meningkat, dan jumlah imigran yang masuk.

Namun dalam konteks pembangunan, ternyata penduduk dapat menjadi faktor pendukung atau malah menjadi faktor penghambat pembangunan. Penduduk sebagai faktor pendukung pembangunan terjadi apabila pertumbuhan penduduk yang besar diikuti dengan sumber daya manusia yang berkualitas akan menaikkan tingkat spesialisasi dan pada gilirannya dapat mendorong peningkatan perekonomian. Adapun dikatakan penduduk sebagai faktor penghambat pembangunan dikarenakan pertumbuhan yang tinggi hanya akan menyebabkan kebutuhan konsumsi lebih banyak dibandingkan kebutuhan untuk berinvestasi sehingga sumber daya yang ada hanya dialokasikan lebih banyak ke pertumbuhan tenaga kerja bukan untuk meningkatkan kapital kepada setiap tenaga kerja sehingga penyerapan tenaga kerja akan melambat dan menciptakan pengangguran (Santika dkk., 2022).

Tabel 1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2015 – 2023 (persen)

Tahun	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tengah	Sulawesi Utara	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Barat	Gorontalo	Pulau Sulawesi
2015	1.12	1.69	1.15	2.18	1.94	1.64	1.62
2016	1.17	1.67	1.13	2.16	1.93	1.62	1.61
2017	1.08	1.65	1.11	2.14	1.93	1.61	1.59
2018	1.06	1.63	1.09	2.12	1.92	1.59	1.57
2019	1.05	1.61	1.07	2.10	1.91	1.58	1.55
2020	1.18	1.22	1.40	1.58	1.98	1.16	1.42
2021	1.23	1.62	0.85	1.75	1.66	1.06	1.36
2022	1.17	1.53	0.82	1.66	1.58	1.02	1.30
2023	1.15	1.22	0.82	1.69	1.54	1.17	1.27

Sumber : BPS Sulsel, diolah

Berdasarkan Tabel 1.3 diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk pada Enam Provinsi Pulau Sulawesi kurun waktu tahun 2015–2022. Menurut BPS, sejak tahun 2015 hingga 2023 laju pertumbuhan penduduk disetiap provinsi di Pulau Sulawesi cenderung menurun. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Pulau Sulawesi tahun 2015 sebesar 1,62 persen dan menurun di tahun 2016 menjadi 1,61 persen. Hingga tahun 2023, tercatat laju pertumbuhan penduduk Pulau Provinsi menurun hingga 1,27 persen. Sulawesi Utara menjadi Provinsi dengan tingkat laju pertumbuhan penduduk terendah yakni 0,82%. Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan pemerintah yakni Program Keluarga Berencana (KB) yang telah diluncurkan sejak tahun 1980-an. Di mana dengan pertumbuhan penduduk yang terkendali dapat mencegah dari kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran yang pada gilirannya akan mengakibatkan meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan (Yani dkk., 2017). Selain itu, pertumbuhan penduduk yang pesat pada negara berkembang dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan dan dalam jangka panjang justru mengalami penurunan (Trisnu & Sudiana, 2019).

Keberhasilan suatu pembangunan manusia juga tidak terlepas dari adanya campur tangan pemerintah. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan

memiliki peran melalui pengeluaran pemerintah sektor publik yaitu pada anggaran di bidang pendidikan yang digunakan masyarakat untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan yang baik dan murah. Pada bidang kesehatan, anggaran dapat meningkatkan angka harapan hidup dan menurunkan angka kematian. Pemerintah sebagai pelaksana pembangunan tentunya memerlukan upaya-upaya seperti membuat fasilitas pendidikan, kesehatan, serta peyediaan lapangan pekerjaan guna menghasilkan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan untuk merealisasikan pembangunan seperti ini, pemerintah menganggarkan belanja secara rutin (Hari & Indrajaya, 2021). Anggaran belanja pemerintah tersebut disebut dengan belanja modal. Menurut Widiani & Arka (2021) menyatakan peningkatan alokasi belanja modal pemerintah seharusnya searah dengan meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang diukur melalui IPM.

Tabel 1.4 Belanja Modal Seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi Tahun 2015 – 2022 (Juta Rupiah)

Tahun	Sulawesi Selatan	Sulawesi Tengah	Sulawesi Utara	Sulawesi Tenggara	Sulawesi Barat	Gorontalo
2015	849,305	442,520	757,277	683,508	445,228	344,244
2016	856,863	503,970	745,899	751,917	498,735	296,922
2017	1,051,187	465,120	757,829	774,553	459,836	254,842
2018	1,081,805	459,780	721,402	795,197	321,974	280,499
2019	969,490	836,620	898,365	1,194,738	364,249	280,120
2020	1,195,023	665,440	1,064,612	1,048,329	323,936	307,180
2021	1,459,719	500,901	828,421	1,246,770	402,867	176,342
2022	1,679,373	617,282	802,320	1,603,143	567,064	110,498

Sumber : BPS Sulsel, diolah

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, tidak heran apabila Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara memiliki nilai IPM dengan kategori tinggi karena jika dilihat dari Tabel 1.4 terkait belanja modalnya, pemerintah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara mengalokasikan rata-rata pendapatannya untuk belanja modal selama 2015-2022 masing-masing sebesar 9,1 triliun, 6,5 triliun, dan 8,1 triliun. Kondisi yang berbeda dialami oleh Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Barat yang masih memiliki nilai IPM dengan kategori

sedang. Dimana anggaran pemerintah untuk belanja modal Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Barat rata-rata selama 2018-2022 sebesar 4,5 triliun, 2,1 triliun, dan 3,3 triliun. Kondisi-kondisi tersebutlah yang diduga mempengaruhi pelaksanaan pembangunan manusia antar wilayah di Pulau Sulawesi.

Adanya kondisi antar wilayah yang berbeda mengakibatkan strategi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah juga berbeda-beda. Perbedaan tersebut dikarenakan antara lain adanya perbedaan potensi sumber daya dan aktivitas manusia yang dilakukan oleh masing-masing wilayah. Untuk mencapai pembangunan yang dapat berjalan dengan adil dan lancar maka pemerintah harus memperhatikan semua daerah tanpa ada perlakuan khusus bagi masing-masing daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis memilih untuk melakukan penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Penduduk, dan Belanja Modal Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Pulau Sulawesi Tahun 2015 – 2023”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah investasi berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di Pulau Sulawesi.
2. Apakah pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di Pulau Sulawesi.
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia di Pulau Sulawesi.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh investasi terhadap kualitas sumber daya manusia di Pulau Sulawesi pada tahun 2015 hingga 2023.
2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap kualitas sumber daya manusia di Pulau Sulawesi pada tahun 2015 hingga 2023.
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kualitas sumber daya manusia di Pulau Sulawesi pada tahun 2015 hingga 2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang akan dilakukan yakni untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh investasi, pertumbuhan penduduk, dan belanja modal terhadap kualitas sumber daya manusia di Pulau Sulawesi. Kemudian gambaran tersebut, dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bahan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan yang relevan untuk mengefektifkan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada 6 provinsi di Pulau Sulawesi. Selain itu dapat pula dijadikan sebagai tambahan referensi bagi peneliti lainnya apabila memiliki penelitian yang serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kualitas Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Sumber daya manusia adalah modal yang dapat terus berkembang seiring waktu serta mengalami kemajuan dalam ilmu pengetahuan. Teori modal manusia (*human capital*) pertama kali diperkenalkan oleh Theodore W. Schultz pada tahun 1961. Schultz menyatakan bahwa human capital merupakan salah satu faktor dalam peningkatan produktifitas ekonomi di suatu negara (Darma, 2020). Menurut teori human capital bahwa pendidikan adalah investasi untuk menghasilkan keterampilan dan pengetahuan yang akan meningkatkan kinerja dan produktivitas individu, yang nantinya akan meningkatkan penghasilan individu dan masyarakat (Rohimah, 2021).

Kualitas sumber daya manusia dapat diukur menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Konsep pembangunan manusia (human development) pertama kali diperkenalkan oleh United Nation Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 yang dikenal sebagai suatu indikator yang bernama Indeks Pembangunan Manusia (Badan Pusat Statistik, 2015). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, yang mengkombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil perkapita yang disesuaikan. Pengukuran indeks pembangunan manusia memiliki beberapa dalam penerapannya (Badan Pusat Statistik, 2021), diantaranya yaitu:

- a. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur capaian dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia

- b. IPM sebagai salah satu indikator target pembangunan suatu wilayah/negara
- c. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis, hal ini dikarenakan selain sebagai ukuran kinerja pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu variable dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan (BPS, 2015) tentang variabel-variabel dalam IPM metode baru yaitu Angka Harapan Hidup Saat Lahir – AHH (Life Expectancy – e) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dari hasil sensus dan survei kependudukan; Rata-rata Lama Sekeolah – RLS (Mean Years of Schooling -MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam perhitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas; Angka Harapan Lama Sekolah – HLS (Expected Years of Schooling – EYS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak; Pengeluaran per Kapita Disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (Purchasing Power Parity/(PPP). Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota.

Adapun capaian pembangunan manusia menurut standar *United Nations Development Program* (UNDP), terdiri dari 4 kriteria (Badan Pusat Statistik, 2021):

1. Kategori sangat tinggi : $IPM \geq 80$

2. Kategori tinggi : $70 \leq \text{IPM} < 80$
3. Kategori sedang : $60 \leq \text{IPM} < 70$
4. Kategori rendah : $\text{IPM} < 60$

2.1.2 Investasi

Investasi (*investment*) merupakan pengeluaran untuk membeli barang modal dan perlengkapan produksi demi menambah kemampuan memproduksi barang serta jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi atau penanaman modal dapat didefinisikan sebagai tambahan bersih atau akumulasi modal terhadap modal yang ada. Penanaman modal menjadi langkah penting dalam kegiatan pembangunan sehingga investasi pada hakekatnya berperan dalam mempercepat laju pertumbuhan di suatu daerah dan negara (Widiani & Arka, 2021).

a. Teori Modal Manusia

Teori Modal manusia yang dipelopori oleh Gary Becker pada tahun 1964 menyatakan bahwa diperlukan investasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Wajdi, 2015). Investasi asing tersebut dianggap sebagai pengeluaran yang akan meningkatkan kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang maupun jasa, serta meningkatkan permintaan efektif seluruh masyarakat. Dalam teori modal manusia ini, dikatakan transfer teknologi dan penciptaan lapangan kerja akibat dari investasi asing akan berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia.

Penanaman modal menurut bentuknya dibedakan menjadi dua macam yaitu investasi investasi fisik dan finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori. PMTB juga memiliki keterkaitan erat dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Di mana aset tetap dapat diklasifikasikan menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya. PMTB itu sendiri merupakan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit

produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri. Sedangkan pengurangan barang modal seperti penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam, pencurian atau kecelakaan tidak dicatat sebagai pengurangan modal (Badan Pusat Statistik, 2023).

Investasi asing dilakukan dalam dua macam bentuk yaitu investasi langsung dan tidak langsung (Mankiw & Gregory, 2014), yaitu sebagai berikut:

1. Investasi langsung (*direct investment*) berarti perusahaan dari negara penanam modal secara *the facto* atau *the jure* melakukan pengawasan atas aset yang ditanamkan di negara pengimpor modal dengan cara investasi. Investasi langsung dapat berupa beberapa bentuk, seperti pembentukan cabang perusahaan di negara pengimpor modal; pembentukan perusahaan di mana perusahaan dari negara penanam modal memiliki mayoritas saham; pembentukan perusahaan di negara penanam modal; pembentukan perusahaan di negara pengimpor yang semata-mata dibiayai oleh perusahaan yang berlokasi di negara penanam modal; pembentukan perusahaan di negara penanam modal untuk secara khusus beroperasi di negara lain; atau menaruh aset tetap di negara lain oleh perusahaan nasional dari penanam modal.
2. Investasi tidak langsung (*indirect investment*) lebih dikenal sebagai investasi *portofolio* yang sebagian besar terdiri dari penguasaan atas saham yang dapat dipindahkan, dan atas saham atau surat utang oleh warganegara dari beberapa negara lain. Para pemegang saham hanya mempunyai hak katas dividen saja.

2.1.3 Pertumbuhan Penduduk

Secara umum, pertumbuhan penduduk dipandang dari dua aspek yakni penduduk sebagai faktor pendukung pembangunan dan penduduk sebagai faktor penghambat pembangunan (Trisnu & Sudiana, 2019). Pertama, menurut Todaro (2015) penduduk sebagai faktor pendukung pembangunan karena

populasi yang lebih besar merupakan pasar potensial yang akan menjadi sumber permintaan barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan kegiatan perekonomian. Kedua, pertumbuhan penduduk sebagai faktor penghambat pembangunan didasarkan pada teori Thomas Malthus. Malthus menjelaskan kondisi peningkatan populasi cenderung bertambah menurut deret ukur sedangkan sumber daya bumi cenderung bertambah menurut deret hitung. Menurut Maier, di kalangan para pakar pembangunan ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, tetapi juga semakin menghambat perkembangan sumber daya manusia (Lembang dkk., 2023).

a. Teori Malthus

Teori ini disebut dengan *Malthusian Population Trap* (Todaro & Smith, 2015). Dalam kondisi ini, kebutuhan penduduk yang selalu bertambah tidak mampu dipenuhi sumber daya yang tersedia. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terjadinya krisis karena ketersediaan sumber daya yang terbatas, yang berdampak pada kualitas hidup dan sumber daya manusia. Masalah pertumbuhan penduduk yang juga digadang-gadang oleh beberapa ekonom sebagai faktor penghambat pertumbuhan perekonomian yang mana dapat mengurangi pendapatan per kapita sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan menjadi masalah serius karena dapat mengakibatkan tingginya jumlah pengangguran jika pertumbuhan tersebut tidak diiringi dengan lapangan kerja yang memadai. Apabila tidak tersedianya lapangan pekerjaan maka akan mengakibatkan kemiskinan yang pada gilirannya akan menuju kearah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan.

Tingkat pertumbuhan penduduk mencerminkan laju pertumbuhan penduduk suatu wilayah setiap tahunnya yang dinyatakan dengan satuan persentase (%). Semakin tinggi angka pertumbuhan mengindikasikan semakin cepat laju pertumbuhan penduduk. Sebaliknya, angka pertumbuhan penduduk yang rendah menunjukkan laju pertumbuhan penduduk yang lambat. Menurut Hamami & Agussaini (2021), pertumbuhan penduduk diklasifikasikan menjadi tiga yakni pertumbuhan lambat, sedang, dan cepat. Pertumbuhan penduduk

dikatakan lambat apabila angka laju pertumbuhan penduduk kurang dari 1% pertahun, pertumbuhan penduduk dikatakan sedang apabila angka laju pertumbuhan penduduk antara 1-2% pertahun dan pertumbuhan penduduk dikatakan cepat apabila laju pertumbuhan penduduk lebih dari 2% setiap tahunnya.

2.1.4 Belanja Modal

Belanja modal merupakan salah satu variasi pengeluaran kebijakan fiskal pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan suatu perekonomian. Pengeluaran pemerintah juga bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu sendiri dengan penyediaan prasarana dan fasilitas sosial seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Belanja modal merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kemudian peran belanja modal yakni untuk meningkatkan pembangunan di sektor infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kelancaran aktifitas perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan membuka kesempatan kerja yang mana belanja modal berupa aset tetap yang mempunyai manfaat jangka panjang.

a. Teori Wagner

Salah satu ekonom Jerman yakni Adolf Wagner mengemukakan suatu teori mengenai pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah yang semakin lama semakin meningkat juga akan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup (Karwur dkk., 2019). Meningkatnya pengeluaran pemerintah berupa belanja modal dapat meningkatkan pelayanan publik akibat dari meningkatnya aset tetap daerah yang merupakan prasyarat dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan yang nantinya akan memberikan dampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wagner mengidentifikasi tiga faktor utama peningkatan belanja pemerintah (Ighodaro & Oriakhi, 2010). Berikut diantaranya;

1. Peran administratif dan protektif pemerintah akan meningkat seiring

berkembangnya perekonomian suatu negara.

2. Dengan perluasan perekonomian, pengeluaran pemerintah untuk “kebudayaan dan kesejahteraan” akan meningkat, khususnya pada pendidikan dan kesehatan.
3. Kemajuan teknologi yang dibutuhkan oleh negara-negara maju mengharuskan pemerintah untuk melakukan layanan ekonomi tertentu yang mungkin dihindari oleh sektor swasta.

2.2 Hubungan antar Variabel

2.2.1 Hubungan Investasi dengan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam teori Harrod-Domar dikatakan bahwa akibat dari penanaman modal yang dilakukan akan menambah kapasitas barang-barang modal dalam perekonomian di masa yang akan datang. Investasi-investasi yang ada akan menciptakan barang modal baru sehingga akan menyerap produksi baru dan membutuhkan tenaga kerja baru, kegiatan ekonomi ini yang dapat membantu masyarakat dari segi pemenuhan kebutuhan melalui penciptaan kesempatan kerja. Hal ini sejalan dengan pendapat Pambudy & Syairozi (2019) yang menyatakan bahwa dengan adanya investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta akan berkontribusi terhadap besaran output yang dihasilkan dalam suatu perekonomian. Akumulasi modal tersebut akan digunakan untuk penyediaan faktor-faktor produksi yang baru atau untuk peningkatan kualitas faktor-faktor produksi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kegiatan investasi juga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi serta kesempatan kerja, investasi modal yang dilakukan di kabupaten/kota di Indonesia telah menciptakan kesempatan kerja yang luas bagi masyarakat Indonesia sehingga meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat. Tingkat pendapatan masyarakat yang meningkat akan mengakibatkan masyarakat dapat meningkatnya kualitas hidupnya dengan pemenuhan kebutuhan hidup dasarnya, seperti kebutuhan di aspek pendidikan dan aspek kesehatan. Sehingga apabila pendapatan masyarakat meningkat maka indeks pembangunan manusia pada akhirnya juga akan ikut meningkat.

Dinamika penanaman modal berpengaruh terhadap tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dan mencerminkan marak lesunya pembangunan. Maka dari itu setiap negara berusaha menciptakan iklim yang kondusif untuk menarik investasi terutama investasi swasta yang dapat meningkatkan kesempatan kerja.

Selain pemerintahan itu sendiri, sektor swasta merupakan aktor yang berperan penting dalam pembangunan. Pemerintah menyadari bahwa tidak semua pembangunan ekonomi dapat dibiayai melalui anggaran pemerintah karena adanya keterbatasan anggaran, sedangkan kebutuhan pendanaan untuk pembangunan terus meningkat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, investasi swasta memegang peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi swasta nantinya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta mengurangi kemiskinan (Siregar, 2019).

Penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) memainkan peran dalam terciptanya infrastruktur yang memadai, dengan hal tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penanaman modal yang dialokasikan ke dalam proyek pembangunan, berarti akan menambah kapital yang pada selanjutnya akan berakibat pada peningkatan pendapatan nasional. Dengan adanya investasi tersebut baik itu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing dapat meningkatkan tambahan stock modal dalam produksi, peningkatan pembangunan infrastuktur, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, menciptakan lapangan kerja, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil, meningkatkan kemampuan daya saing usaha, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta pada akhirnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Williyen & Hasmarini (2024), investasi memiliki hubungan positif terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Timur. Adanya peningkatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta dapat

meningkatkan pembangunan di setiap daerah. Selain itu, akibat dari investasi dapat menciptakan lapangan kerja baru guna menyerap tenaga kerja. Hal ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat yang nantinya akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan manusia yang meningkat. Meningkatnya output akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan nasional yang pada akhirnya taraf kemakmuran masyarakat juga akan meningkat. Hal ini juga sejalan dengan penelitian Simarmata & Iskandar (2022) yang juga menyatakan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Indonesia tahun 2013 – 2018, investasi atau penanaman modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran yang akan meningkatkan kinerja ekonomi, tetapi juga akan meningkatkan permintaan efektif masyarakat. Kegiatan investasi dapat menyerap tenaga kerja sehingga masyarakat yang terserap akan memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan adanya investasi, masyarakat yang sebelumnya pengangguran akan mendapatkan pekerjaan dan pendapatan. Akibat dari meningkatnya pendapatan, daya beli masyarakat yang merupakan bagian dari komponen indeks pembangunan manusia juga akan ikut meningkat.

2.2.2 Hubungan Pertumbuhan Penduduk dengan Kualitas Sumber Daya Manusia

Pertumbuhan penduduk sebagai faktor penghambat pertumbuhan ekonomi didasarkan pada teori Thomas Malthus (1993), yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi akan menyebabkan kebutuhan populasi lebih banyak daripada sumber daya yang menopang kehidupan tidak akan cukup (Trisnu & Sudiana, 2019). Dalam kondisi ini, setiap populasi akan memiliki sedikit lahan untuk bekerja sehingga akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja yang lambat di sektor-sektor modern dan meningkatkan pengangguran. Hal ini juga dijelaskan pada penelitian Wesley & Petersen (2017) yang menyajikan pertumbuhan penduduk di negara berkembang cenderung memunculkan masalah sosial yang nantinya dapat berpengaruh negatif bagi perekonomian, sedangkan di negara maju, pertumbuhan penduduk justru berpengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan nantinya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dikarenakan pendapatan perkapita yang meningkat. Pertumbuhan penduduk yang pesat di negara

berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak akan mengalami perbaikan yang berarti dan apabila hal tersebut berlangsung secara jangka panjang akan berakibat pada penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin. Maka dari itu, pertumbuhan penduduk menjadi permasalahan mendasar dalam pembangunan daerah karena dapat mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran yang pada gilirannya menuju kearah rendahnya sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pembangunan (Yani dkk., 2017).

Astuti & Astika (2016) berpendapat penduduk memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan, sesuai dengan asumsi klasik yang menyatakan bahwa jumlah penduduk mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi jaminan tersedianya input faktor produksi dan juga akan menciptakan pasar yang luas. Namun, pertumbuhan jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah akan menjadi beban pembangunan. Masniadi (2012) dalam penelitiannya juga berpendapat bahwa semakin bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan semakin banyak pendapatan yang harus dibagi. Model *Solow* menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan mempengaruhi kesejahteraan suatu masyarakat yang dicerminkan melalui pendapatan domestik bruto per kapita. Negara-negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memiliki tingkat pendapatan domestik bruto per kapita yang rendah, dan sebaliknya negara-negara dengan pertumbuhan penduduk yang rendah akan memiliki tingkat pendapatan domestik bruto per kapita yang tinggi.

2.2.3 Hubungan Belanja Modal dengan Kualitas Sumber Daya Manusia

Dalam hukum wagner yang dikemukakan oleh Adolf Wagner memperkenalkan hukum pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat seiring semakin meningkatnya kegiatan pemerintah. Hal ini disebabkan meningkatnya fungsi pertahanan dan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, dan meningkatkan fungsi pembangunan. Pengeluaran pemerintah yang dialokasikan dalam belanja modal disesuaikan kebutuhan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan program kerjaan pemerintah ataupun untuk fasilitas publik. Dengan meningkatnya dana belanja

modal yang dikeluarkan daerah maupun pusat secara langsung akan berdampak pada penerimaan dan pembiayaan-pembiayaan daerah. Pengeluaran pemerintah melalui belanja modal yang menargetkan sektor-sektor bersifat produktif, seperti halnya pembangunan sarana dan prasarana, secara tidak langsung akan meningkatkan intensitas perekonomian.

Menurut Hari & Indrajaya (2021) pengeluaran pemerintah merupakan cerminan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dalam hal ini besarnya proporsi belanja modal pemerintah yang dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Alokasi belanja modal melalui pengadaan fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan ditujukan untuk menghasilkan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai sektor publik yang menjadi prioritas dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tercermin pada indeks pembangunan manusia.

Menurut Hendarmin (2012) terdapat dua komponen yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yakni belanja modal pemerintah dan investasi swasta. Di mana belanja modal pemerintah dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana yang nantinya akan meningkatkan intensitas kegiatan ekonomi. Kenaikan aktivitas perekonomian inilah yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang kemudian akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga berperan dalam mendorong tingkat produksi ke tingkat yang optimum dan kontribusi pada tingkat output. Kegiatan pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam ketersediaan infrastruktur yang berasal dari pendanaan belanja modal pemerintah. Infrastruktur tersebut seperti pembangunan jalan, listrik, sanitasi, irigasi, telekomunikasi dan lainnya. Hendarmin (2012) juga menyimpulkan pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh anggaran pemerintah dalam belanja modal dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat yang akan berpengaruh pada peningkatan output barang dan jasa, contoh halnya pembangunan infrastruktur di Indonesia Timur telah berhasil meningkatkan aktivitas ekonomi daerah tersebut. Yang pada akhirnya pendapatan masyarakat dapat ditingkatkan, peningkatan pendapatan ini akan berdampak

pada perluasan pilihan masyarakat dalam meningkatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang layak. Selain itu, dalam pelaksanaannya belanja modal pemerintah akan memerlukan tenaga kerja sehingga belanja modal ini akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sehingga lebih banyak masyarakat yang bekerja dan memperoleh penghasilan, hal ini juga akan berdampak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat.

Rostow & Musgrave menjelaskan hubungan perkembangan pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan ekonomi terbagi menjadi tiga tahap yakni tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, pemerintah melakukan belanja dengan jumlah besar untuk menyediakan fasilitas dan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Kemudian pada tahap menengah, pemerintah berfokus kepada pengeluaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan pada tahap lanjut, pemerintah telah beralih penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan sosial, seperti kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan. Pengeluaran pemerintah yang dialokasikan dalam belanja modal ini akan berdampak pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat akibat dari pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia seperti kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan (Tampubolon, 2019).

2.3 Tinjauan Empiris

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, hasil penelitian yang dilakukan oleh Nam, H., & Ryu, D. (2023) menunjukkan bahwa *Foreign direct investment* (FDI) yang disertai tata Kelola yang baik akan meningkatkan pembangunan manusia di negara tuan rumah. Dibutuhkan tata Kelola yang baik dalam hal ini ialah etika penanaman modal asing perlu dibangun untuk memitigasi pelanggaran hak asasi manusia, korupsi, dan penghindaran pajak serta meningkatkan transfer teknologi. Selain tata kelola, dalam penelitian ini peningkatan pembangunan manusia akan terlaksana apabila investasi asing disertai *Official Development Assistance* (ODA) atau bantuan pembangunan pemerintah dan daya saing suatu negara. Ketiga indikator ini memainkan peran moderat dalam hubungan antara

penanaman modal asing dan pembangunan manusia.

Gokmenoglu *et al.*, (2018) dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Foreign direct investment* (FDI) mempunyai dampak positif dan signifikan secara statistik terhadap pembangunan manusia yakni pada pengembangan pendidikan dan pendapatan negara tuan rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai dampak jangka panjang investasi asing terhadap beberapa dimensi pembangunan manusia di Nigeria periode 1972 hingga 2013.

Williyan, E. A., & Hasmarini, M. I. (2024) dalam penelitian menunjukkan hasil bahwa penanaman modal dalam negeri (PMDN), PDRB, dan jumlah penduduk miskin masing-masing mempunyai pengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia. Dengan adanya investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta akan memperluas lapangan pekerjaan yang dapat menyerap masyarakat kedalamnya dan akan berdampak pada pendapatan masyarakat meningkat. Jika rumah tangga membelanjakan pendapatannya untuk kebutuhan seperti makanan, pendidikan dan kesehatan maka perkembangan manusia akan meningkat.

Simarmata, Y. W., & Iskandar, D. D. (2022) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM. Adapun investasi dan jumlah penduduk mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM. Variabel kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan IPM. Penelitian ini dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data sekunder berbentuk data panel yang merupakan penggabungan dari *time series* dan *cross section*. Periode data *time series* yang digunakan adalah dari tahun 2013 hingga tahun 2018.

Yanti, E. F., Indrawati, L. R., & Prasetyanto, P. K. (2020) dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa pembentukan modal tetap domestik bruto, pengeluaran konsumsi pemerintah masing-masing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Adapun kemiskinan memiliki pengaruh yang signifikan dan bermakna terhadap

indeks pembangunan manusia di Indonesia. Pembentukan modal tetap domestik bruto, pengeluaran konsumsi pemerintah, dan kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia pada tahun 2010 – 2018.

Zebua, W. F., & Adib, N. (2014) dalam penelitiannya menunjukkan hasil analisis bahwa alokasi belanja modal serta belanja barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pembangunan manusia. Adapun variabel alokasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial tidak berpengaruh terhadap kualitas pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan di 26 pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Barat pada tahun 2011 – 2013.

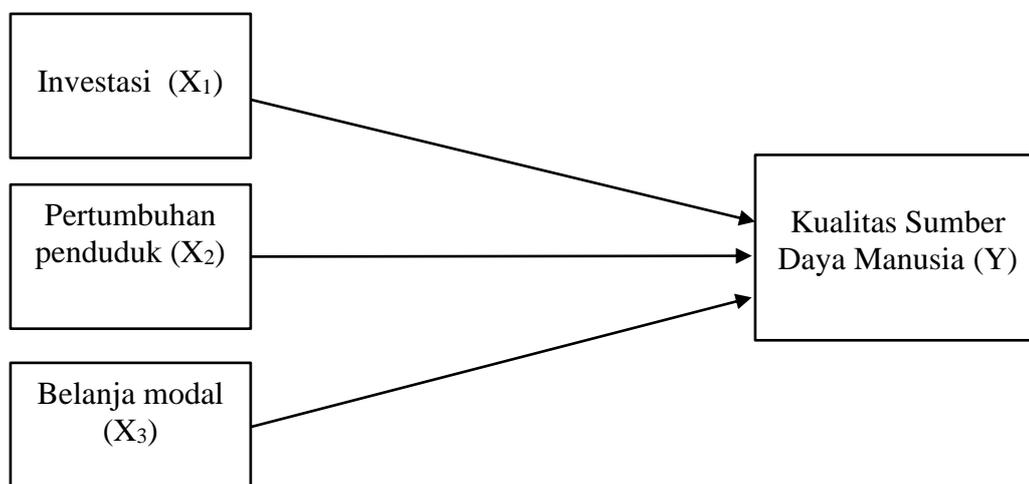
2.4 Kerangka Pikir

Pembangunan ekonomi pada dasarnya bertujuan meningkatkan atau menciptakan keadilan dengan mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah, menciptakan ketersediaan lapangan pekerjaan. Namun, sebagai akibat dari perubahan paradigma yang menyatakan bahwa tujuan akhir dari pembangunan adalah untuk meningkatkan pembangunan manusia (Gokmenoglu *et al.*, 2018). Kualitas sumber daya manusia ini diukur berdasarkan indeks pembangunan manusia (IPM). Dimana indeks pembangunan manusia ini telah mencakup tiga aspek; yakni aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek standar hidup. Namun dalam proses pembangunan manusia itu sendiri terdapat perbedaan kualitas hidup yang dirasakan oleh masyarakat di setiap provinsi di Pulau Sulawesi. Masalah perbedaan kondisi tersebut timbul karena keanekaragaman karakteristik ekonomi, sosial, dan alam yang menimbulkan pola pembangunan ekonomi yang berbeda di masing-masing wilayah sehingga pada beberapa wilayah mampu tumbuh dengan cepat sementara wilayah lainnya tumbuh dengan lambat.

Penelitian ini menganalisis pengaruh investasi, pertumbuhan penduduk, dan belanja modal terhadap kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu tujuan dari pembangunan

nasional yang ingin dicapai. Adapun kualitas sumber daya manusia di Pulau Sulawesi melalui indikator IPM masih berada pada kategori “sedang”. Atas dasar tinjauan teoritis yang telah dikemukakan oleh penulis, maka muncul suatu struktur untuk memperjelas hubungan antara variabel investasi, variabel pertumbuhan penduduk, dan variabel belanja modal terhadap variabel kualitas sumber daya manusia pada 6 provinsi di Pulau Sulawesi.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dibentuk kerangka konseptual yang menunjukkan investasi, pertumbuhan penduduk, dan belanja modal merupakan variabel yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia, digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

2.5 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dijelaskan maka akan diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga investasi berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia di Pulau Sulawesi.
2. Diduga pertumbuhan penduduk berpengaruh negatif terhadap kualitas sumber daya manusia di Pulau Sulawesi.
3. Diduga belanja modal berpengaruh positif terhadap kualitas sumber daya manusia di Pulau Sulawesi.